



Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Bantuan Sosial, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Analysis of Effects of Education Level, Social Assistance, and Minimum Wage On Poverty in Regencies and Cities of Central Java

Zainal Abidin*, Rizal Agri Wahyudi

Sekolah Tinggi Teknik Pati

Jl. Raya Pati-Tayu Km. 4,5. Pati. 59119. Jawa Tengah

*Email: zainal.frsd@yahoo.co.id

Naskah Masuk: 29 Agustus 2025

Naskah Revisi: 5 Mei 2026

Naskah Diterima: 29 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the mean years of schooling, regional minimum wage, and social assistance on the number of poor people across 29 regencies and 6 cities in Central Java Province in 2023. Utilizing the multiple linear regression method, this study reveals that the mean years of schooling has a significant negative effect on poverty levels. Conversely, the other two variables—regional minimum wage and social assistance—exhibit a significant positive effect on the number of poor people. The regression model successfully explains 80.5% of the variation in the poor population within the region. The implications of these findings suggest that improving educational quality and access (mean years of schooling) serves as the most effective instrument for breaking the cycle of poverty in Central Java. Meanwhile, the counterintuitive results regarding the minimum wage and social assistance variables indicate structural gaps, such as potential mistargeting in social aid distribution and the inadequacy of the minimum wage in coping with local inflation. Consequently, local governments need to reformulate social safety net strategies to ensure more precise targeting and shift policy focus from merely charitable aid toward economic empowerment rooted in education and adaptive workforce training.

Keywords: mean years of schooling, multiple linear regression, poverty, regional minimum wage, social assistance,

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, upah minimum regional (UMR), dan bantuan sosial terhadap jumlah penduduk miskin di 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda, penelitian ini menemukan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, dua variabel lainnya, yakni upah minimum regional dan bantuan sosial, menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap jumlah penduduk miskin. Melalui model yang diuji, variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan sebesar 80,5% variasi jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan akses pendidikan (rata-rata lama sekolah) menjadi instrumen paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan di Jawa Tengah. Sementara itu, temuan kontrainuitif pada variabel UMR dan bantuan sosial mengindikasikan adanya celah struktural, seperti potensi salah sasaran dalam distribusi bansos serta ketidakmampuan daya beli UMR dalam mengimbangi inflasi lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mereformulasi strategi jaring pengaman sosial agar lebih tepat sasaran dan menggeser fokus kebijakan dari sekadar bantuan karitatif menuju pemberdayaan ekonomi berbasis pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang adaptif.

Kata kunci: rata-rata lama sekolah, regresi linear berganda, kemiskinan, upah minimum regional, bantuan sosial

PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek utama, antara lain pembenahan struktur sosial, perubahan dalam sistem kelembagaan, serta transformasi perilaku masyarakat yang menjadi komponen mendasar dalam pelaksanaan proses pembangunan (Diana, dkk., 2021). Pembangunan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perbaikan dalam kehidupan sosial, pembaruan sistem kelembagaan, serta perubahan pola perilaku masyarakat yang menjadi bagian penting dalam proses pembangunan itu sendiri yang

secara langsung berkontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan masalah yang hampir dialami oleh seluruh negara, terutama negara berkembang (Muttaqin, 2018). Pembangunan ekonomi berupaya menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang bersifat struktural, pembangunan juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan menyeluruh (Wijayanti & Ihsannudin, 2013). Di sisi lain, kemiskinan struktural dipicu oleh ketidakberdayaan individu maupun kelompok dalam menghadapi tatanan sosial yang timpang.

Indikator kemiskinan saat ini tidak lagi terbatas pada aspek pengeluaran atau pendapatan semata. Sejak tahun 2010 (Sumargo & Simanjuntak, 2019), UNDP bersama OPHI telah memperkenalkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) sebagai metode baru untuk mengukur kemiskinan melalui berbagai sudut pandang (Alkire & Santos, 2014). MPI mengukur kemiskinan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup (Ramdass, 2010). Kemiskinan dapat diklasifikasikan tidak hanya berdasarkan penyebabnya, tetapi juga dari sisi konseptual menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Standar kemiskinan absolut dinilai dari ketidakmampuan seseorang atau sebuah keluarga dalam mencukupi kebutuhan pokok paling mendasar, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan Pendidikan (Pratama, 2015). Sementara itu, kemiskinan relatif terjadi akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata, sehingga memicu kesenjangan dalam pembagian pendapatan masyarakat (Ramdass, 2010).

Angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka 23,85 juta jiwa (Wicaksono, 2025). Jawa Tengah termasuk salah satu wilayah di Indonesia dengan angka kemiskinan yang relatif besar (Djannata, 2011). Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data BPS bulan Maret 2024 sebesar 10,47 persen atau setara dengan 3,7 juta jiwa. Angka tersebut melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 9,03 persen (Kompas, 2024).

Studi mengenai kemiskinan telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menguji faktor pendidikan, upah, dan jaring pengaman sosial secara terpisah, atau hanya berfokus pada skala makro nasional. Penelitian mengombinasikan rata-rata lama sekolah (rls) sebagai representasi modal manusia, bantuan sosial sebagai instrumen intervensi jangka pendek, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai indikator kesejahteraan pekerja formal. Kombinasi ketiga variabel ini diuji pada level kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah karena karakteristik disparitas ekonomi antar-wilayah yang timpang di mana daerah industri dengan UMK tinggi kerap kali masih berdampingan dengan kantong-kantong kemiskinan ekstrem dan ketergantungan bantuan sosial yang tinggi. Tujuan penelitian untuk menganalisis secara empiris pengaruh rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan bantuan sosial terhadap jumlah penduduk miskin di 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023.

TINJAUAN PUSTAKA

Penduduk Miskin

Kemiskinan dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang individu ataupun kelompok masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi standar kebutuhan hidup mendasar, termasuk pangan, pakaian, tempat tinggal, edukasi, serta fasilitas kesehatan. Gejala sosial ini tidak semata-mata dipicu oleh minimnya pemasukan finansial, melainkan juga merepresentasikan keterbatasan dalam menjangkau peluang kerja, modal ekonomi, pendidikan, fasilitas umum, hingga keterlibatan dalam ranah sosial dan program pembangunan. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), kategori masyarakat miskin diartikan sebagai kelompok yang mempunyai rata-rata yang memiliki rata-rata pengeluaran bulanan per kapita di bawah standar garis kemiskinan. Standar ini ditentukan berdasarkan batas minimum pemenuhan komoditas makanan maupun non-makanan. Atas dasar tersebut, tingkat kemiskinan berfungsi sebagai parameter krusial guna mengukur derajat kesejahteraan publik serta tolok ukur kesuksesan program pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Fenomena ini tidak sekadar merefleksikan problem finansial, melainkan juga mengindikasikan minimnya akses terhadap aset-aset penting serta rendahnya keterlibatan warga dalam aktivitas ekonomi dan sosial (Lasabuda, 2013 & Murdani, dkk. 2019). Secara definitif, masyarakat miskin dikategorikan sebagai kelompok dengan tingkat konsumsi perkapita tiap bulan yang tidak mencapai batas garis kemiskinan.

Penentuan garis kemiskinan dihitung berdasarkan standar kebutuhan pokok minimum yang wajib dipenuhi seseorang demi kelangsungan hidup yang layak. Instrumen ini menggabungkan aspek pangan (dikalkulasi lewat pemenuhan kalori) dan aspek non-pangan, seperti edukasi, layanan kesehatan, transportasi, serta papan. Tingginya persentase kemiskinan mengindikasikan adanya ketimpangan sosio-ekonomi yang berimbas pada merosotnya mutu kehidupan masyarakat. Situasi ini berpotensi menghambat kemajuan nasional akibat keterbatasan kaum miskin dalam mengakses sekolah dan lapangan kerja formal, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas serta kesejahteraan kolektif (Hababil et al., 2024).

Ada beragam faktor pemicu kemiskinan, meliputi rendahnya jenjang pendidikan, minimnya keahlian kerja, terbatasnya lowongan kerja, lonjakan jumlah penduduk, hingga ketidakmerataan distribusi pendapatan. Sektor pendidikan yang minim membuat masyarakat kalah saing di pasar kerja, sehingga mayoritas terpaksa bertahan di sektor informal dengan pemasukan yang kecil dan fluktuatif. Problem ini diperparah oleh minimnya akses pembiayaan usaha serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan (Murdani, dkk. 2019). Dampak dari kemiskinan merambah ke sektor sosial; dicirikan oleh rendahnya capaian pendidikan, maraknya angka putus sekolah, serta sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan.

Dalam jangka panjang, problematika tersebut menurunkan mutu sumber daya manusia dan daya saing masyarakat. Ditambah lagi, rendahnya upah minimum yang tidak sebanding dengan biaya hidup layak kian menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan. Jika dibiarkan tanpa penanganan serius, kemiskinan dapat memicu perluasan masalah sosial lain seperti pengangguran, tindakan kriminal, dan kesenjangan yang semakin lebar. Oleh karena itu, intervensi kebijakan pemerintah yang strategis dan kontinu sangat diperlukan, khususnya melalui pembenahan mutu pendidikan, pembukaan lapangan kerja baru, serta distribusi pembangunan ekonomi yang merata di setiap daerah.

Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Penduduk Miskin

Indikator keberhasilan edukasi di suatu daerah dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah. Sektor pendidikan memegang andil krusial dalam menekan angka kemiskinan, mengingat individu berpendidikan tinggi mempunyai kans yang lebih terbuka untuk memperoleh pekerjaan (Alia, 2021). Naik atau turunnya rata-rata lama sekolah berbanding lurus dengan kapasitas keahlian dan efisiensi tenaga kerja, yang kelak menstimulasi kenaikan pendapatan sekaligus mereduksi populasi miskin. Studi empiris di wilayah Jawa Barat mengonfirmasi adanya dampak positif dan signifikan dari rata-rata lama sekolah terhadap kapasitas penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data makro, proporsi masyarakat miskin per Maret 2024 berada di angka 10,47 persen, atau menyusut sebesar 0,30 persen poin jika dikomparasikan dengan posisi Maret 2023. Secara kuantitas, total warga miskin per Maret 2024 mencapai 3,70 juta jiwa, berkurang sebanyak 87,17 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Adapun ambang batas Garis Kemiskinan pada Maret 2024 dipatok senilai Rp507.001 per kapita tiap bulan. Nilai tersebut dibentuk oleh komponen Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp383.285 per kapita tiap bulan (setara 75,60 persen) serta Garis Kemiskinan Non-Makanan senilai Rp123.716 per kapita tiap bulan (setara 24,40 persen).

Di sisi lain, minimnya durasi rata-rata lama sekolah berpotensi menjadi stimulus meningkatnya angka kemiskinan. Impitan finansial kerap kali mendesak anak-anak dari latar belakang keluarga prasejahtera untuk menyudahi pendidikan mereka lebih dini (Lorensa et al., 2023). Alhasil, ruang gerak dan peluang mereka dalam mengakses bursa kerja dengan kompensasi atau upah yang kompetitif menjadi sangat terbatas.

Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Penduduk Miskin

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diartikan sebagai batasan nominal upah paling rendah yang wajib dibayarkan kepada karyawan di wilayah tertentu, merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Trimaya, 2014). Berbagai studi terkait upah minimum menunjukkan adanya korelasi kuat antara kebijakan pengupahan dengan tingkat kemiskinan serta derajat kesejahteraan publik. Intervensi pemerintah dalam menetapkan upah minimum berfungsi sebagai instrumen perlindungan ketenagakerjaan guna menjamin hak pekerja atas penghasilan yang layak demi mencukupi kebutuhan primer.

Kebijakan menaikkan upah minimum pada dasarnya berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pekerja yang berimplikasi pada penguatan daya beli masyarakat. Dengan pendapatan yang lebih mapan, buruh memiliki kapasitas ekonomi yang lebih baik untuk menjangkau sektor pangan, edukasi, kesehatan, hingga pemenuhan sosial lainnya. Riset terdahulu turut mengonfirmasi bahwa pertumbuhan upah minimum efektif meningkatkan taraf hidup pekerja sekaligus mereduksi disparitas pendapatan, khususnya bagi kelompok buruh berpenghasilan rendah (Dawe & C. Peter Timmer, 2025).

Di sisi lain, dinamika kebijakan kenaikan upah minimum tidak lepas dari polemik di kalangan teoretis dan praktisi ekonomi. Sejumlah peneliti berargumen bahwa standarisasi upah yang terlampau tinggi berisiko memicu distorsi negatif pada pasar tenaga kerja, terutama bagi segmen pekerja berketerampilan rendah. Perusahaan yang menghadapi lonjakan biaya operasional akibat penyesuaian gaji cenderung mengambil langkah efisiensi, seperti rasionalisasi jumlah karyawan, moratorium perekrutan tenaga kerja baru, atau mengadopsi sistem otomatisasi dan teknologi modern sebagai substitusi tenaga manusia. Implikasinya, angka pengangguran berpotensi meningkat jika tidak diimbangi dengan akselerasi produktivitas pekerja (Trimaya, 2014). Oleh sebab itu, formulasi kebijakan upah minimum harus dikontekstualisasikan dengan indikator makroekonomi daerah, kapasitas produktivitas, serta kemampuan finansial pelaku usaha agar mampu memproteksi hak pekerja tanpa mengorbankan stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dirancang sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) guna melindungi kelompok masyarakat rentan dari guncangan ekonomi dan kemiskinan ekstrem. Dalam perspektif ekonomi publik, bantuan ini disalurkan dalam bentuk transfer tunai (*cash transfer*) maupun non-tunai (*in-kind transfer*) dengan fungsi utama mendistribusikan pendapatan untuk menjamin standar hidup minimum bagi rumah tangga prasejahtera. Secara teoretis, intervensi jaring pengaman sosial yang disalurkan secara konsisten terbukti mampu menstabilkan volatilitas pendapatan masyarakat rentan selama masa krisis (Hashifah et al., 2025). Selain itu, program bantuan fiskal berupa transfer tunai bersyarat juga dinilai efektif dalam meningkatkan pemenuhan konsumsi pokok penduduk miskin, yang pada jangka pendek berkontribusi signifikan terhadap reduksi indeks kedalaman kemiskinan (Huda et al., 2024).

Meskipun dirancang untuk menekan kemiskinan, efektivitas bantuan sosial di tingkat regional sangat bergantung pada akurasi data birokrasi dan ketepatan sasaran (*targeting accuracy*). Dinamika di tingkat kabupaten/kota sering kali menunjukkan anomali hubungan positif, di mana peningkatan alokasi anggaran jaring pengaman sosial justru berjalan beriringan dengan naiknya angka pencatatan penduduk miskin. Fenomena ini kerap kali dipicu oleh lambatnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga perluasan basis anggaran bantuan justru memperluas pencatatan inklusi data yang tidak tepat sasaran (Widyaningsih et al., 2022). Di sisi lain, penyaluran jaring pengaman sosial yang bersifat konsumtif tanpa diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi yang produktif berisiko memicu perangkap ketergantungan bantuan (*welfare dependency*), yang dalam jangka panjang justru membuat masyarakat rentan tetap bertahan di bawah garis kemiskinan (Sugiastuti & Ulinuha, 2023).

METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Metode penelitian yang digunakan berjenis kuantitatif dengan mengaplikasikan teknik analisis regresi linear berganda (Arif Rohman Hakim, 2023). Pendekatan ini dipilih guna menguji pengaruh serta hubungan antara variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Adapun jenis data yang dipakai ialah data sekunder rilisan BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Sampel penelitian ini meliputi seluruh wilayah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah (Hariawan & Canggih, 2022), di mana keseluruhan data yang telah diperoleh nantinya diolah dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat (Ghozali, I. (2018)). Dengan demikian, model regresi linear berganda dapat dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e \quad \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = Penduduk Miskin
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- β_2 = Koefisien Upah Minimum Kabupaten (UMK)
- β_3 = Koefisien Bansos
- X1 = Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- X2 = Upah Minimum Kabupaten (UMK)
- X3 = Bansos
- e = Error

Analisis Data

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara terpisah.

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan melalui Uji F untuk melihat apakah seluruh variabel bebas memiliki dampak yang berarti terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (probabilitas); jika nilai tersebut berada di bawah tingkat 0,05, hal itu menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara gabungan memberikan pengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Uji R-Square

Uji R-Square digunakan untuk mengukur sejauh mana variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas diterapkan dengan tujuan untuk memastikan apakah nilai residual dalam model memiliki pola distribusi yang normal. Kriteria pengujian menetapkan bahwa residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang diperoleh menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah varians residual bersifat konstan atau tidak. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas (variens residual tidak konstan). Sebaliknya, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, yang berarti varians residual bersifat konstan atau disebut juga homoskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear yang kuat antara dua atau lebih variabel independen. Seluruh variabel bebas, yang terdiri dari rata-rata lama sekolah, upah minimum kabupaten, dan bantuan sosial, mengantongi nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang berada di bawah angka 10. Oleh karena nilai VIF untuk tiap variabel prediktor tersebut kurang dari 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Persentase Kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah, Upah Minimum dan Bantuan Sosial

Berdasarkan data penelitian pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 (Tabel 1), tingkat kemiskinan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar daerah. Kabupaten Brebes memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 17,43%, diikuti Kabupaten Kebumen sebe-

sar 16,82% dan Kabupaten Wonosobo sebesar 16,17%. Sementara itu, Kota Semarang memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 4,53%, disusul Kota Salatiga sebesar 5,98% dan Kabupaten Kudus sebesar 6,19%. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah perkotaan dan wilayah industri cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan daerah pedesaan. Pada variabel pendidikan yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Kota Salatiga memiliki nilai tertinggi sebesar 11,24 tahun, sedangkan Kabupaten Brebes memiliki nilai terendah sebesar 6,40 tahun. Tingginya nilai RLS menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, sehingga peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi juga semakin besar. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat memengaruhi tingginya angka kemiskinan di suatu daerah.

Dari sisi ekonomi, Kota Semarang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi sebesar Rp3.060.348, sedangkan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang memiliki UMK terendah sebesar Rp2.018.000. Tingginya UMK pada daerah perkotaan menunjukkan adanya aktivitas industri dan perekonomian yang lebih maju. Selain itu, bantuan sosial (bansos) terbesar juga terdapat di Kota Semarang sebesar Rp325.700 juta, sedangkan bantuan sosial terendah terdapat di Kota Salatiga sebesar Rp75.800 juta. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, bantuan sosial, dan UMK memiliki keterkaitan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Tabel 1.

Data Kemiskinan, Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Kabupaten, dan Bantuan Sosial

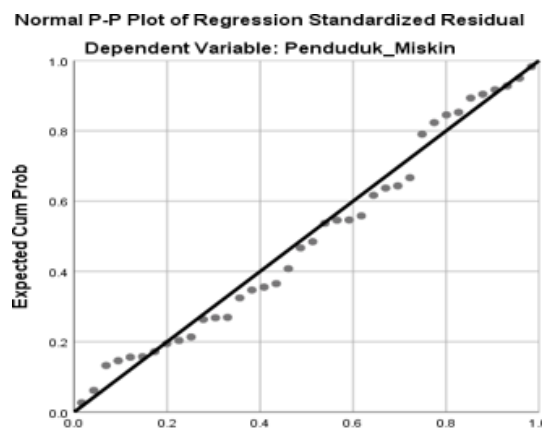
No	Kabupaten/Kota	Kemiskinan (%)	RLS 2023	UMK 2023 (Rp)	Bansos (Juta Rp)
1	Cilacap	11.74	7.39	2,383,090	245,600
2	Banyumas	12.54	7.87	2,118,123	198,300
	Purbalingga	15.03	7.34	2,130,980	176,500
4	Banjarnegara	14.71	6.86	2,038,005	169,200
5	Kebumen	16.82	7.86	2,035,890	210,400
6	Purworejo	11.45	8.46	2,040,000	142,700
7	Wonosobo	16.17	6.89	2,076,000	151,800
8	Magelang	10.83	7.82	2,337,000	185,400
9	Boyolali	9.66	8.09	2,174,169	144,500
10	Klaten	11.89	9.27	2,200,000	173,100
11	Sukoharjo	7.61	9.84	2,215,482	136,800
12	Wonogiri	10.98	7.67	2,049,000	165,900
13	Karanganyar	9.87	9.02	2,250,000	149,700
14	Sragen	12.41	7.87	2,049,000	158,600
15	Grobogan	13.94	7.28	2,080,000	187,300
16	Blora	11.21	7.08	2,150,000	163,400
17	Rembang	14.02	7.72	2,040,000	141,600
18	Pati	10.65	7.80	2,251,000	172,800
19	Kudus	6.19	9.34	2,439,813	118,200
20	Jepara	7.17	8.26	2,272,626	127,500
21	Demak	11.89	8.27	2,680,000	179,200
22	Semarang	7.83	8.07	3,055,000	133,100
23	Temanggung	10.98	7.50	2,027,569	140,600
24	Kendal	9.39	7.73	2,783,455	138,400
25	Batang	9.80	7.07	2,432,000	129,700
26	Pekalongan	11.73	7.47	2,272,000	147,200
27	Pemalang	16.11	6.55	2,018,000	193,500
28	Tegal	8.60	7.34	2,109,000	152,800
29	Brebes	17.43	6.40	2,018,000	221,400
30	Kota Magelang	7.10	11.20	2,300,000	82,500
31	Kota Surakarta	8.44	11.00	2,174,169	104,600
32	Kota Salatiga	5.98	11.24	2,438,000	75,800
33	Kota Semarang	4.53	10.81	3,060,348	325,700
34	Kota Pekalongan	6.88	9.29	2,300,000	91,200
35	Kota Tegal	7.21	9.24	2,139,000	88,400

Sumber: Pengolahan Data, 2023

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2.
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N	Mean	35
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.0000000 30197.74439
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.071
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}



Gambar 1.
Uji Normalitas

Uji Normalitas

Output pengujian normalitas lewat metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan angka signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Berhubung nilai statistik tersebut melampaui standar signifikansi 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka model regresi dinyatakan telah memenuhi asumsi distribusi normal. Penguatan asumsi ini juga didukung oleh visualisasi grafik P-P Plot, yang mengonfirmasi bahwa sebaran data residual berada dalam kondisi normal atau mendekati normal. Bukti tersebut terlihat dari posisi titik-titik data residual yang menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonalnya.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model, yaitu Upah Minimum Kabupaten, Bantuan Sosial, dan Rata-Rata Lama Sekolah, tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian asumsi klasik melalui Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas—yang terdiri dari Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Kabupaten, dan Bantuan Sosial—mengantongi nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang berada di bawah angka 10. Oleh karena nilai VIF untuk tiap variabel prediktor tersebut kurang dari 10 ($VIF < 10$), maka dapat dinyatakan bahwa model regresi yang dibangun terbebas dari masalah atau gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Regresi

Tabel 3.
Unstandardized Coefficients

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	119.942.905	47.197.924		2.541	.016
RLS	-17,165	5.231.985	-.417	-3.281	0,02
UMK	0,25	0,08	.287	3.142	0,03
Bansos	1,48	0,31	.562	4.819	0,00

Persamaan Regresi

Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi negatif antara rata-rata lama sekolah dengan tingkat kemiskinan, ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar -17.165. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada rata-rata lama sekolah diprediksi akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 17.165 satuan. Sebaliknya, koefisien Upah Minimum Kabupaten/Kota bernilai positif (0,25), yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan satu satuan UMK justru berpotensi menambah populasi masyarakat miskin sebesar 0,25 satuan. Pola searah juga ditemukan pada variabel Bantuan Sosial dengan nilai koefisien 1,48; di mana penambahan satu satuan bantuan sosial berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,48 satuan.

Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan kriteria uji t, sebuah variabel independen dinyatakan memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Dari hasil pengujian masing-masing variabel, diperoleh temuan sebagai berikut: variabel Rata-Rata Lama Sekolah mencatatkan nilai signifikansi 0,002 ($< 0,05$), yang berarti variabel ini berpengaruh nyata terhadap jumlah Penduduk miskin. Selanjutnya, variabel Upah Minimum Kabupaten menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003 ($< 0,05$), sehingga disimpulkan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat Penduduk miskin. Pola yang sama juga terlihat pada variabel Bantuan Sosial dengan nilai signifikansi 0,003 ($< 0,05$), yang menegaskan bahwa program bantuan sosial turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kuantitas penduduk miskin.

Uji Simultan

Merujuk pada output Tabel Anova, nilai F hitung yang dihasilkan adalah sebesar 46.676 dengan tingkat signifikansi mencapai 0,000. Oleh karena nilai probabilitas tersebut jauh lebih kecil dari standar 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa kombinasi variabel bebas—yang meliputi Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Kabupaten, serta Bantuan Sosial—secara serempak (simultan) memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat, yaitu jumlah Penduduk miskin.

Uji Diterminan

Uji Determinan (R Square) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel Model Summary, nilai R Square adalah 0,805. Ini berarti bahwa variabel independen, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Kabupaten, dan Bantuan Sosial, mampu menjelaskan 80,5% variasi pada variabel dependen, yaitu Penduduk miskin. Sementara itu, 19,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Tabel 4.
Hasil Uji Anova^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.390E+11	3	4.632+10	46.676	.000
	Residual	3.374+10	34	992365863.4		
	Total	1.727E+11	37			

Sumber: Pengolahan Data, 2023

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan yang ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi yang bernilai negatif (-17.165). Adapun variabel upah minimum regional dan bantuan sosial menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan yang ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi yang bernilai positif (0,25) dan (1,48). Hubungan kausalitas antar variabel tersebut secara matematis ditunjukkan oleh persamaan estimasi regresi berikut: $\text{Penduduk Miskin} = 119.942,905 - 17.165(X_1) + 0,25(X_2) + 1,48(X_3) + e$

Saran

Saran bagi Pemerintah Daerah yaitu perlu adanya evaluasi mendalam mengenai implementasi kebijakan UMK dan akurasi target penyaluran Bantuan Sosial agar tidak memicu dampak semu (anomali) terhadap angka kemiskinan, serta terus menggenjot program wajib belajar untuk meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah.

Saran bagi Penelitian Selanjutnya yaitu diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan (*time series*) atau menambahkan variabel makro ekonomi lain (seperti tingkat pengangguran atau inflasi daerah) untuk menguji konsistensi dari temuan positif pada variabel UMK dan Bantuan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alia, A. Akhmad, K. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan untuk Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(6), 173–181. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/419>
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59, 251–274. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2024). Rata-rata Lama Sekolah RLS Menurut Jenis-kelamin.
- Diana, E., M. & Arie, A., S., D., (2021). Loka Pengawas Obat dan Makanan : Transformasi New Public Service dalam Reformasi Administrasi BPOM. *Administrasio: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. 12, 1–14.
- Dawe, D., & C. Peter Timmer. (2025). The Future of Rice in Asia: Public and Private Roles1. *AgEcon Search*, 22, 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.37801/ajad2025.22.1.1>
- Djannata, A. (2011). Analisis Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut Skpd (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Semarang dengan Metode AHP (Analisis Hierarki Proses). *Phys. Rev. E*, 24. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>
- Hariawan, H. D. A., & Canggih, C. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi di Pasar Modal Syariah: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9 (4), 495–511. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp495-511>
- Hashifah, D., Rahmawati, Y. D., Harahap, M. A., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Efektivitas kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi di era pasca pandemi*. 4(4).
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Email : royhuda03. 7(2), 189–201.

- Kompas. (2024). *Warga Miskin Jateng Masih 37 Juta Penduduk di Atas Persentase Kemiskinan*. <https://regional.kompas.com/read/2024/12/20/054227778/>
- R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>
- Lorensa, D., Rohady Ramadhan, M., & Jabbar, A. (2023). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. 10, 150–158.
- Murdani, dkk. (2019). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*. Vol. 23 No. 2
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective. *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1(2):117-122. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Esensi*, 4 (2), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Ramdass, R. (2010). Managerial communication - The key to Continuous Engagement And Competitive Advantage. *Proceedings - European Aviation Safety Seminar, EASS*, 08(03), 585–597.
- Sugiasuti, N., & Ulinuha, R. (2023). Politik Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat: Kasus Ketergantungan Kebijakan Bantuan Sosial di Temanggung, Jawa Tengah. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.78588>
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.2019.10>
- Trimaya, A. (2014). Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 11–20.
- Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, Toyamah, N., & Hastuti. (2022). Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. In *Working Paper SMERU: Vol. No 1 (Issue 1)*. www.smeru.or.id.
- Wijayanti, L., & Ihsannudin. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Agriekonomika*, 2(2), 139–152. <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/433>